



## **ANALISIS POLA PROPAGANDA TERKAIT ISU RASISME PAPUA DI RUANG SIBER**

**Gede Satrya Wibawa, Margaretha Hanita, Wawan Hari Purwanto**

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik & Global,  
Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang menuntut kemerdekaan atau pemisahan diri dari Indonesia dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara dan berpotensi kepada terjadinya disintegrasi bangsa yang sehingga harus diantisipasi secara dini. Gerakan KST di Papua memiliki sejarah panjang, namun sejak tahun 2000 mengalami transformasi yang awalnya hanya menggunakan tindak kekerasan kemudian dikolaborasikan dengan cara-cara lunak. Kemudian dengan semakin mudahnya akses internet dan mempertukarkan pesan melalui media sosial memudahkan kelompok Kelompok Separatis Teroris (KST) melancarkan aksi propaganda baik dengan target penduduk daerah, nasional maupun masyarakat internasional. Berbagai internasionalisasi isu Papua merupakan cara sistematis upaya mendukung disintegrasi Papua termasuk salah satunya menggunakan narasi terkait rasisme. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pola propaganda isu rasisme Papua di ruang Siber. Dengan demikian penelitian hanya dibatasi pada upaya menganalisis pola propaganda berkaitan dengan isu rasisme yang dilakukan di ruang siber, serta strategi – strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi propaganda yang dilakukan oleh kelompok Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua.

**Kata Kunci:** Rasisme, Isu Papuas, Propaganda, Siber.

## PENDAHULUAN

Ancaman gerakan separatisme cenderung semakin meningkat ketika secara politik dan emosional, dikaitkan dengan aspek kekhasan budaya, etnis dan sejarah, serta diperkuat oleh aktor-aktor gerakan separatisme yang menggalang dukungan dari internasional. Lebih lanjut Viartasiwi (2018) menjelaskan mengenai perubahan situasi politik dari pendekatan keras yang dilakukan pada masa Orde Baru terhadap gerakan separatisme di Papua kemudian beralih lebih lunak dimasa Habibie dan Abdurrahman Wahid. Namun terdapat perbedaan kebijakan secara signifikan pada akhir periode kepemimpinan Megawati hingga saat ini, karena pendekatan kesejahteraan semakin diutamakan khususnya melalui penerapan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dengan harapan agar Orang Papua dapat menjadi "tuan di rumahnya sendiri".

Perkembangan kemajuan teknologi juga diikuti oleh aktor-aktor separatis Papua yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendukung agenda pergerakannya. Ruang siber adalah ruang yang sulit dikontrol dan pesan-pesan yang ada didalamnya dapat digunakan untuk memuluskan propaganda gerakan separatis dan agenda-agenda politik mereka (Paramitha, 2019). Laman BBC.com (2019) menerbitkan tulisan berjudul "Papua protest Racist taunts open deep wounds" yang menyoroti masalah ujaran rasisme tersebut yang menitikberatkan pada psikologi massa dari rakyat 3 Papua yang merasa mengalami perlakuan diskriminatif dalam konteks kehidupan sosial politik di tanah air pasca kemerdekaan hingga hari ini (BBC News, 2019a). (Max dan Lane, 2019) Apabila melihat tulisan - tulisan ini dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang paling mendasar mengenai isu separatisme di Papua yang kali ini dipicu

melalui masalah rasial yaitu tentang posisi Papua di Indonesia.

Mengemukanya isu Papua di dunia internasional tidak lepas dari kampanye Kelompok Separatisme Papua (KSP) yang didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional. Pergerakan ini dilakukan oleh tokoh OPM yang berdomisili di negara tersebut diantaranya West Papua National Council (WPNCL) pimpinan Andy Ayamiseba yang bermarkas di Port Villa, Vanuatu, Free West Papua Campaign (FWPC) pimpinan Benny Wenda di Inggris dan West Papua National Authority (WPNA) pimpinan Jacob Rumbiak di Australia.

Kedua dampak ini menciptakan kondisi yang tidak pernah berakhir yang termanifestasikan dari aktivitas-aktivitas politik maupun militer dari kelompok ini untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam konteks propaganda yang dilakukan oleh kelompok ini dalam ruang siber maka diperlukan analisis mendalam dalam konteks internal dan juga eksternal ini. Kemudian yang kedua mengenai kemampuan rakyat Papua dalam menghadapi ketidakadilan oleh negara tersebut dan yang akhirnya menghasilkan poin ketiga yaitu insentif untuk mengubah nasib politik dan kesejahteraan tersebut menjadi lebih baik di masa mendatang.

Dalam konteks ini maka gerakan separatisme di Papua memiliki relevansi politik ekonomi yaitu ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa (Hale, 2008b). Propaganda kelompok separatis Papua ditinjau dari ketiga hal di atas dapat dilihat dalam pesan-pesan yang dipertukarkan di dalam ruang siber. Identitas yang berbeda yang ditonjolkan dengan penggunaan kasus-kasus rasial yang terpisah menunjukkan bahwa cara ini dipandang efektif untuk melegitimasi gerakan separatis ini. Perlakuan rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Pulau Jawa dapat dirasakan secara

komunal oleh masyarakat Papua di lain tempat sebagai landasan untuk memisahkan diri dari identitas keindonesiaan. Selain politik identitas, pola propaganda kelompok separatis Papua juga dapat dilihat dari aspek komunikasi yang mereka pilih dan lakukan di media massa.

Melalui perspektif ini maka perlakuan diskriminatif yang mereka rasakan merupakan bagian dari perampasan atas hak-hak kelompok dan identitas keindonesiaan menjadi tidak relevan karena mereka merasa menjadi bagian dari identitas kultural yang lebih pasti yaitu etnis. (Kim, 2007) Oleh karena alasan-alasan di atas, kompleksitas permasalahan isu rasisme dan separatisme di Papua ini membutuhkan strategi yang komprehensif dari Pemerintah Indonesia. Hal ini membutuhkan analisis mendalam mengenai jalinan masalah yang diakibatkan oleh menguatnya isu rasisme dengan gerakan separatisme yang selama ini masih berlangsung sejak zaman kolonialisme.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif muncul dalam setting yang alamiah dimana di dalamnya ada banyak perilaku dan peristiwa kemanusiaan yang terjadi. Peristiwa dalam penelitian ini adalah terkait dengan adanya propaganda isu rasisme di ruang Siber.

Sementara itu peneliti juga menentukan desain atau jenis penelitian sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Jenis metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiono (2018) deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. (Sugiyono, 2018)

Penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pada penelitian kualitatif, Sugiyono (2015) teknik pengambilan sampling yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dinilai paling tahu terkait apa yang peneliti butuhkan atau sebagai penguasa/pimpinan lembaga sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti. Kemudian *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang sedikit lama – lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum memberikan data yang lengkap, sehingga mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2015, p. 300).

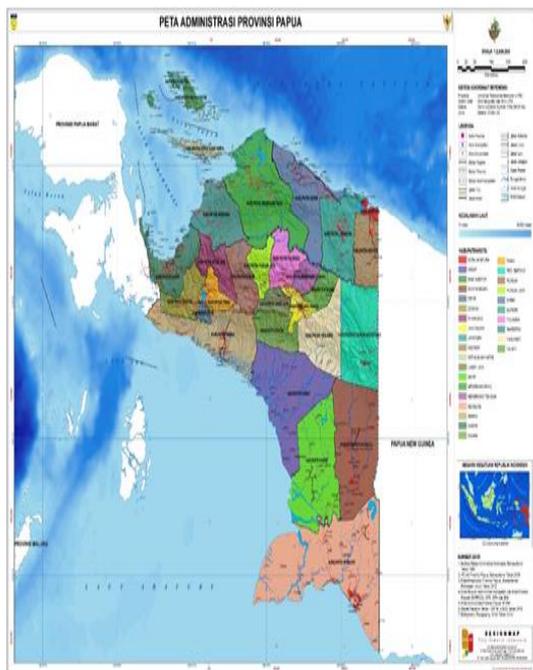
Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memilah data, dan mereduksi sumber penelitian yang berbentuk naratif yang kompleks. Peneliti akan menggunakan alat matriks, grafik, jaringan kerja, bagan untuk merakit informasi agar mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti menekankan aspek kejujuran dalam menyimpulkan permasalahan yang hendak diteliti agar dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam menghadapi pola propaganda kelompok separatisme Papua dan isu rasisme yang digunakan kelompok separatisme Papua di ruang siber.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Gambaran Umum Pola Propaganda Terkait Isu Rasisme Papua di Ruang Siber**

Papua merupakan provinsi dengan letak paling timur di wilayah Negara Indonesia dan berdasarkan posisi geografisnya berbatasan dengan Samudera Pasifik sebelah Utara; Laut Arafuru sebelah Selatan; Provinsi Papua Barat sebelah Barat; dan Negara Papua Nugini sebelah Timur. Luas wilayah Provinsi Papua mencapai 316.552,6 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 28 Kabupaten dan 1 Kota dengan topografi wilayah terdiri dari pegunungan dan pesisir. Total jumlah penduduk Papua sekitar 2.576.822 jiwa, atau dapat dikatakan hanya 1% dari total penduduk Indonesia.



**Gambar 1. Peta lokasi Papua Barat**  
 Sumber Gambar: Google, 2021

Walaupun demikian, sebagian besar orang asli Papua masih banyak yang tinggal di pedesaan atau daerah

terpencil dengan akses terhadap kebutuhan pokok rendah. Sementara itu, hasil sensus Papua tahun 2000, disebutkan bahwa penduduk yang tinggal di perkotaan terdiri dari 55% penduduk non-Papua dan 45% asli Papua. Dari data tersebut juga dinyatakan bahwa hanya 30% jumlah penduduk di Papua tinggal di pusat kota-kota. Merujuk dari data diatas, Pemerintah kemudian memberikan kebijakan arifmatif dimana Provinsi Papua ditetapkan menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Merebaknya pembahasan rasisme Papua diawali dengan isu rasial di Surabaya tahun 2019 yang kemudian menjadi pemicu adanya kerusuhan di berbagai wilayah Papua maupun Papua Barat antara lain di Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab. Fakfak, Kota Jayapura, dan Kab. Jayawijaya. Peristiwa di Surabaya yang memantik kerusuhan bermula 15 Agustus 2019.

Menurut data YLBH bahwa kasus terkait rasisme Papua di Surabaya bukan merupakan kasus pertama. Disampaikan bahwa banyak mahasiswa Papua yang belum sepenuhnya mendapatkan kenyamanan akibat tindakan dari aparat hukum saat sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, isu rasisme ini dalam perkembangannya semakin sering dimanfaatkan khususnya oleh kelompok separatis Papua untuk terus menarik simpati dan perhatian dari kalangan internasional. Disamping itu, intelektual separatis Papua juga selalu membangun nasionalisme Papua itu dari momentum-momentum tindakan atau

isu-isu rasisme, dengan harapan terjadi gap/ pemisahan yang semakin kuat antara Papua dan Indonesia termasuk untuk membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM.

Hingga saat ini kelompok separatis Papua dinilai cenderung lebih terkonsolidasi dalam mencapai tujuan memisahkan diri dari Indonesia khususnya jeda adanya pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menggabungkan banyak kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak sebagai kombatan (kelompok bersenjata) maupun melalui politik. ULMWP yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu kemudian mengemban misi mengkampanyekan Papua Merdeka (free west Papua campaign) dengan melakukan lobi-lobi politik ke berbagai negara untuk mendapat dukungan internasional. Peran ULMWP tersebut dibantu beberapa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan telah mengangkat persoalan isu Papua berkembang dari tingkat domestik menjadi isu internasional. Upaya yang dilakukan dengan membawa permasalahan Papua ke ranah internasional seperti *Pasific Island Forum* (PIF), *Organization of African, Caribbean and Pasific States* (OACPS), *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR); dan *United Nations General Assembly* (UNGA).

## **2. Isu Rasisme Papua di Ruang Siber**

Otonomi Khusus Papua disebutkan bahwa Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. Keberagaman internal ras Papua misalnya perbedaan pola sosial budaya

masyarakat Papua yang tinggal di pesisir dan yang tinggal di gunung itu berbeda.

Diketahui dari Rumansara (2015), bahwa orang asli Papua yang mendiami Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) berjumlah 254 suku bangsa. Keyakinan yang dimiliki masyarakat Papua, umumnya sama saja dengan masyarakat lain, namun ada perbedaan dari kultur suku yang masih begitu kental dalam masyarakat Papua. Terdapat pula sebagian keyakinan masyarakat Papua, yang mana mereka menganggap selalu berbeda dengan yang masyarakat lain di Indonesia, secara adat istiadat, ras, suku, karakter, ideologi, mata pencarian, kehidupan sehari-hari, dan bahasa setiap suku-suku berbeda. Sebagaimana, rasisme mengacu pada keyakinan bahwa kelompok manusia memiliki ciri perilaku yang berbeda sesuai dengan penampilan fisik dan dapat dibagi berdasarkan keunggulan satu ras atas yang lain (Dennis, 2004) Menurut Newman, D. M. (2012) menjelaskan rasisme merujuk pada keyakinan bahwa manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda yang berbeda dalam perilaku sosial dan kapasitas bawaan mereka dan yang dapat digolongkan sebagai superior atau inferior.

Pada kasus lain, maraknya tuduhan orang Papua dengan kalimat 'monyet', hitam, keriting, pemabuk, kotor, malas, dan brutal, menunjukkan cara pandang diskriminatif/ rasis terhadap Orang Asli Papua. Sebetulnya, rasisme bukanlah sifat bawaan dari lahir namun suatu proses yang dikonstruksi sehingga menjadi rasis (Elisabeth, 2021).

Dalam Nasution dan Wiranto (2020), dijelaskan bahwa pada periode September hingga Oktober 2019 terhadap aktivitas media sosial yang menyebarkan isu rasisme dalam bentuk tulisan dan gambar tertentu tentang peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya. Adapun beberapa konten propaganda isu rasisme terdapat dalam

postingan akun Instagram @freewestpapua.australia pada 28 Agustus 2019, dimana menampilkan sebuah aksi demonstrasi di depan KJRI Melbourne, Australia, yang menanggapi isu dugaan rasisme terhadap masyarakat Papua. Pada postingan kali ini, para pengunjung rasa membawa tulisan dalam aksi unjuk rasa, "Hentikan Rasisme dan Militerisme Terhadap Orang Papua, Satu Tujuan, Kebebasan!!!", "Hentikan Rasisme, Biarkan Monyet Bebas " dan "Hentikan rasisme, Orang Papua Bukan Monyet". Akun tersebut memberikan caption "Dukungan Melbourne untuk Papua Barat Merdeka! Solidaritas luar biasa ditunjukkan di Konsulat Jenderal Indonesia dalam sikap menentang rasisme di Papua Barat." Dengan tag #FreeWestPapua.

Isu rasisme Papua memang tersebar sangat cepat dan masif di ruang siber. Diketahui bahwa isu rasisme Papua sangat mendominasi media sosial seperti group whatsapp dan juga tersebar dari mulut ke mulut, dengan tujuan utama menggaungkan alasan papua merdeka. Isu rasisme cukup cepat tersebar di media sosial seperti twitter dan facebook yang memungkinkan berita tersebar secara cepat dan realtime. Selain itu, ditenggarai bahwa terdapat oknum yang memang secara khusus mengurus penyebaran isu ini melalui media sosial karena perkembangannya yang sangat cepat.

### **3. Pola Propaganda Isu Rasisme di Ruang Siber**

Isu rasisme Papua selama ini lebih dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan khususnya dari kalangan separatis Papua untuk melakukan propaganda negatif terhadap Pemerintah RI maupun aparat keamanan dalam rangka memunculkan dan memperluas kebencian dikalangan masyarakat Papua, memperkuat dukungan terhadap agenda kelompok mereka, menimbulkan sikap reaktif yang

dapat memicu aksi massa, serta menarik perhatian berbagai kalangan baik didalam maupun luar negeri.

Metode penyebaran isu rasisme Papua biasanya lebih mendominasi dilakukan pada media sosial dalam bentuk poster, melalui tulisan, melalui pesan whatsapp group, melalui warung kopi, kampus dan antar asrama ke asrama. Poster-poster akan dipasang di media sosial untuk menambah kesan penindasan maupun ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Papua. Beberapa intelektual separatis Papua juga dengan sengaja menuliskan kata-kata rasial didalam tubuh mereka dan diposting di media sosial untuk menumbuhkan pemikiran bahwa tindakan yang mereka lakukan mewakili seluruh masyarakat Papua. Hal secara tidak langsung bahwa sistem propaganda yang digunakan adalah Symbolic Interaction Propaganda, yaitu penggunaan simbol-simbol sebagai propaganda. Tokoh intelektual separatis Papua yang rata-rata lebih senior juga secara aktif menggelar pertemuan secara tertutup di asrama-asrama Papua untuk memberikan pemahaman bahwa isu rasial yang disematkan kepada beberapa mahasiswa Papua merupakan bentuk penghinaan kepada masyarakat Papua secara keseluruhan.

Pertemuan juga dilakukan secara daring yang secara khusus membahas isu rasisme Papua mengundang berbagai kalangan khususnya elemen mahasiswa maupun tokoh dan pimpinan organisasi yang memiliki perhatian serta kepentingan terkait dengan Papua dengan harapan isu rasisme tersebut juga tersebar dengan luas. Adapun penggunaan media whatsapp group, dijadikan sebagai strategi cepat untuk menyebarkan informasi isu rasisme tersebut sehingga dapat langsung diterima dan disebarkan oleh anggota grup tersebut dengan mudah dan cepat. Tidak jarang konten isu rasisme yang bersifat provokatif

disebarkan di aplikasi *chatting* tersebut kembali di amplifikasi di media sosial sehingga semakin memasifkan penyebaran sebuah hoax dan memicu terjadinya reaksi massa.

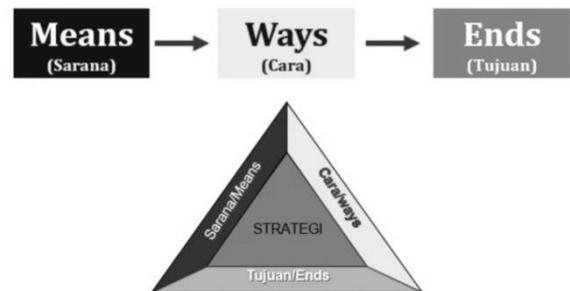
Menurut Irawan Sukarno (2018) ada tiga bentuk propaganda yaitu: a) propaganda putih, adalah propaganda yang menyebarkan informasi ideologi dengan menyebut sumbernya; b) propaganda abu-abu, adalah propaganda yang dilakukan oleh kelompok yang tidak jelas yang ditujukan untuk mengacaukan pikiran orang lain, adu domba dan gosip; c) propaganda hitam, adalah propaganda yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan moral lawan yang tidak mengenal etika dan cenderung berpikir sepihak.

#### 4. Strategi Pemerintah Menghadapi Isu Rasisme Papua di Ruang Siber

Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi (Mintzberg, 1994). Sebuah perspektif dibutuhkan untuk memulai dan menentukan posisi tertentu dan harus dapat dicapai melalui rencana yang dibuat dengan baik secara matang, keberhasilan dari strategi akan tercermin dari pola - pola yang jelas untuk menentukan sebuah keputusan yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Sebuah pola dalam keputusan dan tindakan apa yang disebut strategi akan termanifestasikan dan muncul.

Oleh sebab itu, sebelum membahas strategi, perlu ditentukan perspektif yang jelas, hal utama yang mendasar yaitu Pemerintah Indonesia dan masyarakat luas harus lebih memahami budaya yang ada di Papua yang mana lebih dominan ke Ras Melanesia, sehingga diperlukan cara khusus agar kita tahu bagaimana melakukan pendekatan yang tepat dan

membuat kebijakan. Dengan pendekatan Rasial dan Genetik dapat dibuatkan wadah berupa Pusat Kajian Budaya Melanesia sehingga dapat mengkaji dan mengenal lebih dalam bagaimana budaya kekuasaan dan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang melekat di masyarakat Papua.



Gambar 2. Konsep Strategi  
Sumber Gambar: Google, 2021

Arthur F Lykke (1997) dalam bukunya *“Defining Military Strategy”* dalam *Military Review* No 77 Vol 1. menjelaskan tujuan yang ingin dicapai memerlukan suatu cara dan rencana yang tepat, cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*Ends*), cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (*Ways*) dan sarana prasarana serta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan (*Means*). Berdasarkan konsep strategi tersebut, disusun strategi yang memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan (*Ends*) yaitu mengatasi propaganda isu rasisme oleh kelompok-kelompok separatis di Papua di Ruang Siber. Sementara sarana dan prasarana serta cara mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Strategi Mengatasi Isu Rasisme Papua di Ruang Siber Menurut Informan

Strategi		
Ends	Means	Ways
Mengatasi Propaganda isu rasisme yang dapat menyebabkan konflik	Kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuka lapangan pekerjaan untuk OAP</li> <li>▪ Memfasilitasi mahasiswa</li> </ul>

Strategi		
Ends	Means	Ways
dan memicu aksi separatisme Papua	h provinsi serta didukung organisasi masyarakat dan agama dan peran serta media	<p>Papua dengan akomodasi pelatihan untuk mengasah <i>skill</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memaksimalkan penyiaran media tentang progres pembangunan di Papua yang sudah maju dan tidak lagi tertinggal</li> <li>▪ Ormas dan organisasi keagamaan bersatu mengontrol ketertiban dan melawan isu rasisme</li> <li>▪ Seluruh pejabat tingkat provinsi dan kota bersatu menyampaikan pemahaman 4 pilar bangsa dan negara</li> </ul>
Pemerintah Indonesia dan masyarakat luas harus lebih memahami budaya yang ada di Papua yang mana lebih dominan ke Ras Melanesia, sehingga diperlukan cara khusus agar kita tahu bagaimana melakukan pendekatan yang tepat dan membuat kebijakan.	Pendekatan Rasial dan DNA (Genetik) dan klarifikasi informatif tentang Papua dari Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membentuk Pusat Kajian tentang budaya Melanesia, dari segi sistem politik, sistem kekuasaan, sistem ekonomi, sistem sosial budaya</li> <li>▪ Pemerintah membuat program-program <i>Hybrid Leadership</i> Papua</li> <li>▪ Berdiskusi dengan tokoh-tokoh lain yang jauh lebih didengar suaranya oleh</li> </ul>

Strategi		
Ends	Means	Ways
		<p>masyarakatnya sehingga bisa memberikan masukan kepada Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam upaya menekan penyebaran isu rasisme di Ruang Siber, Pemerintah perlu menyampaikan narasi-narasi yang tidak bersifat menyangkal, menjelaskan kenapa isu tersebut bisa terjadi, proses yang berhasil dan yang belum berhasil, sehingga masyarakat umum dapat pemahaman yang sama dan terpercaya, dan bisa lebih mengapresiasi tentang keberagaman yang ada.</li> </ul>

Sumber Tabel Transkrip Wawancara (Diolah Peneliti, 2021)

Papua hari ini, terutama setelah berpuluh-puluh tahun berdinamika dengan berbagai isu diskriminatif, rasisme dan HAM, maka tidak ada pendekatan yang instan, tidak ada pendekatan yang istilahnya mujarab untuk selesaikan Papua dengan cara biasa. Itu artinya jika kita punya sebuah pusat kajian yang serius mengkaji tentang Melanesia di Papua, ini juga sebagai sebuah bentuk komitmen untuk lebih tahu tentang cara-cara kita berinteraksi dengan teman-teman di Papua. Kalau kita mau klaim, kita harus

punya dulu pusat kajiannya, kemudian kita dapat berinteraksi dulu dengan pusat kajian yang sama di negara lain, baru kita dapat mengatakan dengan percaya diri bahwa memang benar ini Pusat Kajian terbesarnya di Indonesia.

Sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Papua, beberapa upaya mengatasi propaganda isu rasisme dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli Papua, memfasilitasi mahasiswa Papua dengan akomodasi pelatihan untuk mengasah skill, karena dengan begitu orang-orang Papua usia muda dapat lebih merasa memiliki Indonesia yang memperhatikan kebutuhan mereka. Karena memang pembangunan di Papua sudah banyak perkembangan, baik dari segi sumber daya manusia, segala pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta kemajuan pendidikan unggulan dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi yang ada di Papua meskipun belum maju sepenuhnya.

Pemerintah perlu menyampaikan narasi-narasi yang tidak bersifat menyangkal, menjelaskan kenapa isu tersebut bisa terjadi, proses yang berhasil dan yang belum berhasil, sehingga masyarakat umum dapat pemahaman yang sama dan terpercaya, dan bisa lebih mengapresiasi tentang keberagaman yang ada.

## **SIMPULAN**

Strategi mengatasi isu rasisme Papua di ruang Siber dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi serta didukung organisasi masyarakat dan agama dan peran serta media diantaranya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk OAP, Memfasilitasi mahasiswa Papua dengan akomodasi pelatihan untuk mengasah skill, Memaksimalkan penyiaran media tentang progres pembangunan di Papua yang sudah maju dan tidak lagi tertinggal, Ormas dan organisasi

keagamaan bersatu mengontrol ketertiban dan melawan isu rasisme, Seluruh pejabat tingkat provinsi dan kota bersatu menyampaikan pemahaman 4 pilar bangsa dan negara Pemerintah Indonesia dan masyarakat luas harus lebih memahami budaya yang ada di Papua yang mana lebih dominan ke Ras Melanesia, sehingga diperlukan cara khusus agar kita tahu bagaimana melakukan pendekatan yang tepat dan membuat kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, J. W., & David, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.*

Dennis, Mc Quail. 2004. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.

Fatimah, I. (2019). Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Konten Propaganda Radikal. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/iskyfatimah/pengaruh-media-sosialdalam-penyebaran-konten-propaganda-radikal>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

Fanon, Frantz. 1967. *Black Skin, White Mask*. Trans. Charles Lan Markmann. New York: Grove.

Grosfoguel, Ramon. 2011. "What Is Racism?", *Journal Of World-System Research*. nomor 7. tt Vol. 22

Lykke, Arthur F, 1997. "Defining Military Strategy" dalam *Military Review* No 77 Vol. 1

Mintzberg, H. (1994) *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press, New York.

Newman, D. M. (2012). *Sociology Exploring the Architecture of Everyday Life* (9th ed.). Los Angeles: SAGE, 405.

Nasution, M. Alfi Rajabi dan Surya Wiranto. 2020. *Propaganda Issues of Racism Through Social Media to Trigger Social Violence in Papua and West Papua in 2019*. *Jurnal Pertahanan* Vol 6 No. 2 (2020) pp. 212-224

Raharjo, A. (2018). Propaganda dan Pelaksanaan Pilpres 2019. Dari <https://www.kompasiana.com/aryoraharjo/propaganda-dan-pelaksanaan-pilpres-2019#>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial* (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 106. ISBN 978-602-99802-0-2.

Rumansara, Enos H. "Memahami Kebudayaan Lokal Papua : suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua." *Jurnal Ekologi Birokrasi*, vol. 1, no. 1, 2015.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Thamrin, Mahandis Yoanata. 2019. *Migrasi Manusia dan Perjalanan Sejarah Melanesia di Indonesia*. Diakses melalui [www.nationalgeographic.grid.id](http://www.nationalgeographic.grid.id) pada 1 November 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua